



LAHAN DEMPLOT TAB

8°38'28", 116°4'27", 49,0m,

KEMENTERIAN PERTANIAN RI

20 Sep 2023 11:3

Kondisi pertanian di Indonesia tidak sedang baik-baik saja, hampir semua komoditas pangan utama kita bergantung pada negara lain, mulai dari kedelai, jagung, gula, sampai beras. Peran penyuluhan pertanian tidak hanya sebagai perpanjangan tangan dari proyek-proyek pemerintah, tetapi juga sebagai penjaga kedaulatan pangan dan sahabat tempat berkeluh kesah petani dengan segala suka-dukannya. Mengembalikan peran penting atau revitalisasi peran penyuluhan pertanian menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia.

REVITALISASI PENYULUHAN MENINGKATKAN PRODUKSI PERTANIAN

Penulis:

¹Cecep Suhardedi, ²Soleh Wahyudi

^{1,2} Widyaiswara

^{1,2} Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

E-mail: cecepsuhardedi@gmail.com

Permasalahan sebuah negara di sektor pertanian masih pada seputar bagaimana memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah konsumsi yang harus diimbangi dengan jumlah produksi. Pangan adalah kebutuhan primer rakyat yang mutlak harus dipenuhi. Menurut A.T. Mosher (1973) dalam bukunya yang berjudul *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*, untuk meningkatkan produksi pertanian utamanya pangan nasional merupakan suatu tugas yang kompleks. Hal ini karena kondisi pertanian tiap daerah yang berbeda-beda, berikutnya orang atau kelompok yang mengelola juga berbeda. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) pertanian diperlukan karena semangat saja tidak cukup, diperlukan juga kecerdasan, imajinasi, uji coba, serta kerja keras yang terus-menerus.

Upaya yang dilakukan oleh Penyuluh pertanian sangat berhubungan erat dengan pengembangan SDM pertanian, khususnya petani yang menjadi pelaku utama di sektor pertanian. Penyuluhan pertanian sebagai salah satu sistem pendidikan non-formal bagi petani, berupaya meningkatkan perilaku petani, mulai dari pengetahuan, kemampuan, dan kemauan agar memiliki kesejahteraan lebih baik secara berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai hasil sensus pertanian 2023 menunjukkan bahwa jumlah petani pengguna lahan di Indonesia adalah 27,79 juta orang dan 17,24 juta orang di antaranya adalah petani gurem dengan luas lahan garapan kurang dari 0,5 hektar. Jika melihat data proyeksi penduduk Indonesia tahun 2023 yang berjumlah 378,69 juta jiwa, ini berarti proporsi

petani hanya sekitar 10% dari jumlah total penduduk Indonesia. Faktanya memang sektor pertanian di Indonesia belum mampu menjadi penopang kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani seperti yang dicita-citakan. Usaha penyuluhan pertanian untuk pemberdayaan petani diharapkan dapat meningkatkan daya saing sehingga terwujud petani yang maju, mandiri, dan sejahtera.

SEJARAH PENYULUHAN

Sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia memiliki dinamika dan dipenuhi gelombang pasang surut. Hal ini berkaitan dengan perubahan kebijakan pembangunan pertanian. Dimulai dari usaha peningkatan produksi pertanian, kebutuhan komoditas baru, kebutuhan pengetahuan yang diperoleh melalui

penelitian, serta perlunya penyampaian hasil penelitian kepada sasaran melalui proses pendidikan dan pelatihan, serta yang lebih utama adalah perubahan pada diri petani.

Perkembangan penyuluhan pertanian berawal dari masa sebelum kemerdekaan (tahun 1817-1941), saat pembangunan Kebun Raya Bogor pada tahun 1917. Pengenalan jenis-jenis tanaman baru menandai dimulainya pembangunan pertanian di Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan tersebut usaha memperbaiki pertanian rakyat diterapkan dengan sistem tanam paksa dan kekuasaan pangreh praja. Pada masa kemerdekaan (1945-1966), pendekatan pembangunan pertanian rakyat mengalami perubahan, tetapi sistem komando tetap dari pusat. Hal ini berdampak pada kurang tumbuhnya kesadaran masyarakat.

Masa orde baru (1966-1998) kegiatan penyuluhan pertanian mulai mendapat pengakuan dari petani itu sendiri sebagai dampak atas keberhasilan swasembada beras nasional. Namun, pendekatan sentralistik dan *top down* tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang makin memiliki keragaman. Pertanian berperan sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri berharga murah, pengendali stabilisasi harga, dan pemasok tenaga kerja murah.

Sementara, pada masa reformasi atau otonomi daerah (1998-sekarang) peran penyuluh mengalami perubahan yang sangat signifikan. Desentralisasi dan kewenangan lokal membuat kebijakan penyuluhan pertanian lebih bersifat lokal dan tergantung pada kebijakan daerah masing-masing.

PENYULUHAN PERTANIAN DARI MASA KE MASA

Tahun 1984 adalah masa keemasan pertanian dengan pengakuan dari FAO (*Food and Organization of United Nations*) atau Organisasi Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap keberhasilan swasembada beras. Saat itu dilakukan pendekatan keseragaman program yang dikenal dengan panca-usaha tani. Hal ini menjadikan Indonesia dari negara pengimpor beras menjadi negara berswasembada beras. Masa tersebut merupakan masa keberhasilan penyuluhan pertanian. Akan tetapi muncul persepsi negatif yang menggambarkan penyuluhan pertanian hanya sebagai alat untuk meningkatkan produksi, bukan untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini bisa dilihat dari kondisi kesejahteraan petani yang tidak meningkat meskipun produksinya meningkat.

Sejak keberhasilan swasembada tahun 1984, penyuluhan pertanian yang menjadi pendukung pembangunan pertanian di Indonesia mulai mengalami "kemunduran". Jumlah penyuluh pertanian berkurang sangat cepat. Dukungan pembiayaan untuk melaksanakan tugas penyuluhan juga menurun. Permasalahan tersebut membuat peran sektor pertanian semakin menurun. Hal ini menyadarkan semua pemangku kepentingan tentang pentingnya peran penyuluhan pertanian dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pertanian dengan revitalisasi peran penyuluhan pertanian.

Memasuki periode reformasi dan dimulainya sistem otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus peningkatan kualitas SDM sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini tentu membuka peluang pengembangan potensi wilayah. Peran penyuluh pertanian semakin diperlukan untuk mendorong masyarakat petani memanfaatkan sumber daya dan peluang yang ada di lingkungan masing-masing.

Penyuluh diharapkan dapat mengidentifikasi potensi dan kebutuhan petani setempat serta dapat menerapkan pendekatan penyuluhan yang sesuai. Harapan tersebut membutuhkan perubahan kualifikasi dari tenaga penyuluh yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Van den Ben & Hawkins (1999) dalam bukunya yang berjudul *Penyuluhan Pertanian*, bahwa sebagian besar penyuluh pertanian dididik untuk memperbaiki atau mengubah cara budi daya.

Penyuluh pertanian dididik untuk mengenali jenis-jenis varietas tanaman, jenis tanah, pupuk, pakan ternak, dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, penyuluh diminta untuk mampu mengubah perilaku petani agar dapat membuat keputusan sendiri terkait usaha taninya. Keberhasilan penyuluh dalam mengemban tugas ini sangat ditentukan oleh perilaku penyuluh itu sendiri. Seringkali keberhasilan dalam suatu proses penyampaian informasi



Gambar 1 Kegiatan penyuluhan di Sanggau, Kalimantan Barat
Sumber: Cristy Lagana

bukan ditentukan oleh apa yang disampaikan, tetapi justru oleh siapa penyampai pesan itu.

Sistem penyuluhan pertanian di negara kita juga belum mensinergikan antara penyuluhan, pendidikan, dan penelitian pertanian. Penyuluhan, pendidikan, dan penelitian pertanian seakan berjalan sendiri-sendiri padahal ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempunyai tugas menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Tugas lainnya adalah melakukan pengintegrasian unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK di lingkungan Kementerian/Lembaga. Kehadiran BRIN diharapkan mampu memberi dampak positif dalam bidang penelitian termasuk di dalamnya bidang pertanian. Kolaborasi dengan lembaga akademisi dan penyebaran informasi membutuhkan saluran dan aturan hukumnya. Hal ini diperlukan supaya semua yang terkait akan mempunyai panduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kita bisa belajar sistem penyuluhan pertanian di Amerika Serikat (AS) yang memiliki sektor pertanian modern. Ekspor produk-produk pertanian Amerika, seperti kedelai menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Salah satu pendukung perkembangan sektor pertanian di Amerika adalah sinergi antara penyuluhan, pendidikan, dan penelitian pertanian. Penelitian dilakukan berdasarkan tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi petani. Sementara itu, hasil penelitian yang berupa pengetahuan dan teknologi baru disebarkan melalui institusi pendidikan dan sistem penyuluhan sehingga mendorong penerapan pengetahuan dan teknologi baru tersebut.

KEMAMPUAN PENYULUHAN

Keberhasilan seorang penyuluh dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi, kemampuan komunikasi, bersikap dan memecahkan masalah di lapang. Berikut adalah penjelasan tentang kemampuan yang penting bagi seorang penyuluh.

1. Kemampuan berkomunikasi. Ini artinya seorang penyuluh harus

mampu berkomunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis. Penyuluh juga diharapkan mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh para petani.

2. Kemampuan bersikap. Penyuluh diharapkan mampu menghayati profesinya sebagai penyuluh pertanian serta merasa keberadaannya sangat dibutuhkan oleh petani sasaran. Penyuluh juga harus mencintai petani dampungannya dan menyakini bahwa informasi dan inovasi yang disampaikan telah teruji. Wiriaatmadja dalam bukunya *Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian* terbitan tahun 1973, berpesan melalui falsafah Jawa bahwa penyuluh pertanian itu adalah pekerjaan yang “*sepi ing pamrih rame ing gawe*” yang artinya sebagai penyuluh pertanian harus rela kerja keras tanpa memikirkan keuntungan untuk diri sendiri.

3. Kemampuan memecahkan masalah. Penyuluh diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi petani atau kelompok sasaran mereka dan menawarkan solusi yang sesuai.



Gambar 2 Gambar 2 Padi apung lahan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyuluhan berdasarkan potensi dan kearifan lokal
Sumber: Heri



Gambar 3 Pelatihan penyuluh pertaniandi BBPP Binuang, peserta mendapatkan teori dan juga berkesempatan praktik langsung agar nantinya mampu menerapkan di wilayah kerja masing-masing
 Sumber: Cecep Suhardedi

Ini memerlukan pemahaman yang baik tentang situasi lokal dan pengetahuan yang relevan di bidang pertanian.

4. Kemampuan pengetahuan. Penyuluh diharapkan mampu memahami isi, fungsi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan, latar belakang dan kondisi masyarakat baik menyangkut perilaku, kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta kebutuhan-kebutuhan petani sebagai sasaran penyuluhan. Penyuluh harus mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya di lingkungan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, penyuluh pertanian juga berperan sebagai anggota masyarakat. Ini artinya segala tingkah laku, gerak-gerik serta tata cara harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Upaya tersebut akan menumbuhkan kepercayaan dari para petani, yang

pada akhirnya bisa membuat petani menerima apa yang disarankan atau dianjurkan oleh penyuluh. Anjuran yang diberikan pada petani tidak harus sesuatu yang baru, bisa juga berasal dari petani itu sendiri yang telah berhasil dan untuk selanjutnya dikembangkan supaya lebih baik lagi.

Kemampuan-kemampuan di atas tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penyuluhan, tetapi juga untuk memastikan bahwa penyuluh telah diterima sebagai sahabat dan mitra petani yang berharga dalam peningkatan produksi dan pengembangan pertanian yang berkelanjutan.

REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN

Penyuluhan pertanian yaitu sarana pembelajaran petani dalam

proses penemuan sepanjang hayat terhadap sesuatu yang dibutuhkan dan perlu diketahui. Perubahan kadang begitu cepat terjadi, seperti dalam inovasi dan teknologi pertanian yang terus berkembang. Samsudin (1976) dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*, memaparkan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian adalah suatu proses yang terus-menerus. Dengan demikian, saat petani membutuhkan bantuan, penyuluh harus siaga untuk melayani. Tujuan penyuluhan harus disusun dalam rencana kerja yang terdiri dari tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek lebih menekankan pada tujuan untuk menumbuhkan perubahan yang lebih terarah dalam kegiatan usaha tani, seperti perbaikan teknik budidaya untuk meningkatkan produksi. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani.

Petani yang sejahtera adalah tujuan yang ingin dicapai dari penyuluhan pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, kegiatan penyuluhan pertanian mempunyai dasar hukum dalam memberikan dukungan bagi keberhasilan pembangunan pertanian. Akan tetapi, kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian masih sering berubah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kegiatan penyuluhan pertanian. Revitalisasi peran penyuluhan pertanian dapat dimulai dari aspek peran penyuluh pertanian untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan pertanian yang mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Hubungan sosial yang terjalin antara penyuluh pertanian dan petani merupakan modal berharga. Antara pemerintah dan petani akan terbentang jarak, jika peran penyuluh melemah. Melemahnya peran penyuluh pertanian akan berdampak pada pembangunan pertanian, terutama pada peningkatan produksi.

Revitalisasi penyuluhan pertanian didasari kondisi untuk menyiapkan penyuluh pertanian yang profesional dan memiliki kemampuan lengkap. Penguatan peran dan fungsi penyuluh sebagai rekan dan bahkan sahabat petani perlu dikuatkan lagi. Penyuluh harus mempunyai kemampuan dalam menggali, mengolah, dan menerapkan

suatu informasi tentang cara budi daya ataupun teknologi baru yang mampu meningkatkan hasil usaha tani.

Sehubungan dengan ini dibutuhkan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh. Pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh bisa didapat dari tempat sekolah atau universitas dengan melanjutkan pendidikan. Tempat pelatihan juga bisa menjadi pendukung bagi penyuluh, baik difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun daerah serta bisa bekerja sama dengan pihak lain, termasuk pihak swasta.

Pelatihan bagi penyuluh sekarang lebih mudah diakses dengan perkembangan jaringan internet yang memungkinkan pelatihan secara *online* atau daring (dalam jaringan). Namun, tetap diperlukan pelatihan secara tatap muka atau luring (luar jaringan). Banyak pelatihan teknis pertanian yang memerlukan praktik langsung yang rasanya sulit digantikan oleh pelatihan secara daring. Hasil pelatihan diharapkan dapat disebarluaskan dan diterapkan kepada para petani di wilayah kerja penyuluh sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing.

Dukungan bagi penyuluh pertanian juga dapat berupa dukungan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, penyuluh membutuhkan kejelasan deskripsi dan standard operasional prosedur (SOP) atau tata kerja baku.

Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyuluh, peningkatan dukungan teknis dan komunikasi, serta peningkatan sistem informasi dan manajemen penyuluhan adalah dukungan yang dibutuhkan penyuluh.

Cita-cita untuk memiliki sektor pertanian yang berproduksi tinggi, berdaulat, dan mampu berswasembada bukan hanya mimpi ataupun jargon semata. Namun, semua memerlukan proses yang terus-menerus dan berkelanjutan serta kemampuan belajar dari sejarah masa lalu untuk perbaikan ke depan. Revitalisasi peran penyuluhan pertanian adalah salah satu cara yang utama dalam mencapai cita-cita tersebut. Peran penyuluh pertanian sangat vital sebagai sahabat petani serta jembatan antara kebijakan pemerintah dan petani. Meletakkan semua tanggung jawab di pundak penyuluh pertanian juga tidaklah tepat.

Beban kerja penyuluh tetap harus diperhatikan. Pekerjaan yang lebih bersifat administratif harus dikurangi agar kunjungan ke petani lebih maksimal. Sinergitas serta dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk membangun pertanian Indonesia. Demikianlah revitalisasi penyuluhan pertanian harus dipahami bersama sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

**